



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BPJS KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor : PER / 79 / 112019**

**Nomor : 010.5/26.43/43/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA  
BPJS KETENAGAKERJAAN**

Pada hari ini Rabu , tanggal tiga belas, bulan Nopember, tahun dua ribu sembilan belas (13-11-2019) di Muntilan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **BPJS Ketenagakerjaan** : Suatu Badan Hukum publik yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Bambang Gunawan Wibisono,SE.,MM** dalam jabatannya selaku **Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang** berdasarkan Nomor: KEP/207/072014 tanggal 14 Juli 2014 Perihal Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Nomor: SKS/7/012019, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Jend. A. Yani No. 403, Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Rumah Sakit .....

- II. **RSUD Muntilan Kabupaten Magelang** : Suatu Rumah Sakit yang beralamat di Jalan Kartini No.13, Muntilan, Magelang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. M. Syukri, MPH**, sebagai Direktur Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 3 Maret 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RSUD Muntilan Kabupaten Magelang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang berlokasi di Muntilan Kabupaten Magelang

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; dan

Berdasarkan .....

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju membuat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang bukan menerima gaji atau upah.
5. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
6. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
7. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

8. Formulir Pengajuan Klaim yang selanjutnya disebut FPK adalah formulir baku yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang wajib diisi oleh Faskes dan disertakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan klaim/tagihan atas biaya pelayanan kesehatan.
9. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif maupun non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
10. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan medis bagi peserta baik pelayanan obat Rawat jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
11. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan di Faskes untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medik lainnya.
12. Gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan tindakan atau pertolongan medis segera dan apabila tidak dilakukan akan berakibat fatal.
13. Pelayanan gawat darurat adalah penyelenggaraan pelayanan gawat darurat medik secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
14. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat PLKK adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter bersama, dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja.
15. Alat bantu kesehatan adalah alat kesehatan yang dapat berupa bahan, instrumen, aparatus, mesin, implant, dan perangkat lunak yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
16. Kelas perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak peserta sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
17. Eligibilitas adalah keabsahan peserta dalam mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja.
18. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Faskes.

9 . Tarif paket esensial .....

19. Tarif paket essential yang selanjutnya disingkat TPE adalah suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan pada kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang secara paket berdasarkan diagnosis tunggal, tanpa komplikasi maupun penyakit penyerta dengan pola terapi sesuai standar pelayanan medis.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta;
- b. biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. administrasi; dan
- e. sanksi.

**BAB IV .....**

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta**

##### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan prosedur pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
- (2) Prosedur pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) secara lengkap diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Biaya dan Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan**

##### **Tarif Pelayanan Kesehatan**

##### **Pasal 5**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan termasuk alat bantu kesehatan bagi peserta dibayarkan sesuai tarif yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, perhitungannya menggunakan tarif yang berlaku di rumah sakit.
- (3) Kelebihan biaya pelayanan kesehatan dari tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang terjadi akibat keinginan peserta ditagihkan **PIHAK KEDUA** kepada peserta.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap diatur dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

##### **Pasal 6 .....**

## Pasal 6

- (1) Pengajuan pembayaran klaim dari **PIHAK KEDUA** dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah dilakukan verifikasi **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Tata cara pembayaran pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Bagian Ketiga

### Hak dan Kewajiban

## Pasal 7

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
  - a. peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam kasus kecelakaan kerja;
  - b. mendapatkan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu sesuai Surat Pernyataan Persetujuan (*informed consent*);
  - c. mendapatkan tagihan pelayanan kesehatan dan laporan perincian kasus jaminan kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan aplikasi, atau format Lampiran IV; dan
  - d. melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  - a. menyediakan aplikasi dan melatih tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan *user manual*-nya;
  - b. menyediakan data nama Peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasis *website* atau data manual bila diperlukan;

c . memberikan ....

- c. memberikan daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. melakukan pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. mendapatkan data nama peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasis *website* atau data manual bila diperlukan;
- b. mendapatkan aplikasi dan pelatihan bagi tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan *user manual*-nya;
- c. memperoleh informasi tentang tata cara pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta;
- d. memperoleh daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. menerima pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dengan baik sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);
- b. memberikan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu sesuai Pernyataan Persetujuan (*informed consent*);
- c. mengajukan tagihan pelayanan kesehatan dan memberikan laporan perincian kasus jaminan kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, sesuai dengan aplikasi, atau format Lampiran IV; dan
- d. memberitahukan informasi tentang perubahan pelayanan kesehatan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Bagian Keempat

### Administrasi

#### Pasal 8

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerja sama ini, sesuai dengan Lampiran V.

Bagian Kelima ....

## Bagian Kelima

### Sanksi

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal keterlambatan pembayaran karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah klaim yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan dan maksimal 24 bulan, kecuali untuk kasus yang data tagihannya dianggap masih kurang lengkap.
- (2) Jika klaim biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan dari waktu klaim yang telah ditentukan, maka terhadap **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi yaitu pemotongan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan bila pengajuan klaim tersebut sampai melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari waktu klaim yang ditentukan, dianggap klaim tersebut tidak pernah ada.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI ....

**BAB VI**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 11**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian kerja sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian kerja sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN

#### *Addendum*

#### Pasal 12

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (*addendum*) dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Addendum* sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Perbedaan Penafsiran

#### Pasal 13

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### Jangka Waktu

#### Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian Kerja Sama .....

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri

Perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian kerja sama ini kepada **PIHAK** lainnya.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai *copy* untuk keperluan administrasi.

**PIHAK KEDUA,**  
  
Dr. M. Syukri, MPH

**PIHAK PERTAMA,**  
  
Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

Lampiran I.....

## LAMPIRAN I

Perjanjian : PER/ ...../112019  
Nomor : 019.9/2648/48/2019.

### Tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan

#### PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKK BAGI PESERTA

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Program JKK yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja melalui prosedur pelayanan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peserta datang berobat dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau e-KTP;
2. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang meneliti eligibilitas peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja melalui aplikasi di *website* BPJS Ketenagakerjaan (alamat *website*: <https://es.bpjsketenagakerjaan.go.id/tc/login.bpjs>) atau menghubungi petugas yang ditunjuk oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat;
3. Petugas Rumah Sakit melakukan konfirmasi ke **Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang** jika nama peserta tidak eligibel atau terdapat notifikasi (peringatan) untuk melakukan konfirmasi data;
4. BPJS Ketenagakerjaan wajib melakukan pengecekan data eligibilitas peserta tersebut. Jika peserta memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat, maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembaharuan data (*updating data*) selambatnya 2 (dua) hari kerja agar data peserta tersebut muncul di dalam sistem pengecekan eligibilitas;
5. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja yang didampingi oleh perwakilan pemberi kerja, maka perwakilan pemberi kerja;
  - 5.1. Mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan bersedia menanggung untuk biaya perawatan dan pengobatan karyawan yang tidak ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 5.2. Menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang telah dilengkapi.

Peserta yang .....

6. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat berangkat kerja atau pulang kerja yang tidak didampingi oleh perwakilan pemberi kerja, maka pihak rumah sakit menghubungi pemberi kerja;
  - 6.1. Untuk melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait adanya kasus kecelakaan kerja;
  - 6.2. Mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan bersedia menanggung untuk biaya perawatan dan pengobatan karyawan yang tidak ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 6.3. Menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang telah dilengkapi.
7. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas, maka penjamin pertama dapat diajukan ke PT. Jasa Raharja (Persero) sampai batas plafon, selanjutnya kelebihan biaya dari plafon dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan;
8. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) seperti kecelakaan tunggal, maka dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan;
9. Peserta yang tidak terbukti mengalami kecelakaan kerja tidak dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penjaminan dapat diajukan ke BPJS Kesehatan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku atau menjadi tanggungan peserta;
10. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang mengisi formulir pengajuan surat jaminan melalui aplikasi atau manual, untuk kemudian dikirimkan ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diterbitkan surat jaminan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peserta mendapatkan perawatan dan pengobatan;
11. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat jaminan melalui aplikasi atau manual untuk peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima notifikasi pengajuan surat jaminan dari sistem atau laporan pengajuan surat jaminan dari Petugas Rumah Sakit;
12. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dapat merujuk peserta ke fasilitas kesehatan PLKK yang lebih tinggi dengan melampirkan dokumen, yaitu;
  - 12.1. surat rujukan; dan
  - 12.2. salinan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1) dari pemberi kerja.

13. Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang merawat peserta wajib mengisi formulir 3b KK 3 untuk kasus kecelakaan kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus penyakit akibat kerja jika perawatan dan pengobatan dinyatakan selesai;
14. Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan dapat diwakilkan oleh perwakilan perusahaan atau keluarga untuk menandatangani formulir bukti layanan setelah mendapatkan pelayanan;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang wajib menyediakan ruang perawatan kelas 1 rumah sakit pemerintah sesuai dengan hak peserta, dan apabila tidak tersedia kelas yang ditentukan maka peserta dapat dilayani di ruang perawatan yang tersedia sampai terdapat ruang perawatan kelas 1;
16. Penagihan biaya ruang perawatan sesuai dengan ruang kelas perawatan yang digunakan oleh peserta;
17. Pemberian resep obat-obatan oleh Tenaga Medis Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang bagi peserta Program JKK mengutamakan obat-obat Formularium Nasional (FORNAS) dan Formularium Rumah Sakit;
18. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dapat memberikan jasa pelayanan ambulan untuk:
  - 18.1. menjemput peserta Program JKK yang mengalami kecelakaan kerja di lokasi kejadian kecelakaan kerja;
  - 18.2. mengantar/merujuk pasien peserta Program JKK apabila diperlukan rujukan ke Pusat Layanan Kerja lain;
  - 18.3. besarnya biaya pelayanan ambulan dapat diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan;
  - 18.4. penggantian biaya pelayanan ambulan sesuai dengan standar biaya ambulan yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
  - 18.5. Dalam hal belum terdapat tarif dasar ambulan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, tarif yang ditetapkan mengacu pada biaya yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah.
19. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis program JKK yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Peserta Program JKK, antara lain meliputi:
  - 19.1. Pelayanan gawat darurat;
  - 19.2. Pelayanan rawat jalan;
  - 19.3. Pelayanan rawat inap;
  - 19.4. Pemeriksaan penunjang, diagnostik;
  - 19.5. Perawatan intensif (ICU, ICCU, HCU);
  - 19.6. Pelayanan khusus (kesehatan jiwa)
  - 19.7. Alat kesehatan dan implant sesuai dengan kebutuhan medis;
  - 19.8. Tindakan medis ...

- 19.8. Tindakan medis yang bersifat operatif dan non-operatif
- 19.9. Pelayanan darah; dan
- 19.10. Rehabilitasi medik

20. Hal-hal yang tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja:

- 20.1. kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, atau hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- 20.2. kecelakaan yang terjadi di mess/perkemahan yang tidak berada di lokasi (tempat) kerja;
- 20.3. kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan;
- 20.4. kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi:

Contoh: pergi untuk makan, tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika perusahaan yang bersangkutan menyediakan fasilitas makan.

20.5. Sakit biasa yang tidak ada hubungannya dengan hubungan kerja; dan

20.6. Hal-hal yang tidak ditanggung adalah:

- 20.6.1. Bunuh diri;
- 20.6.2. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- 20.6.3. Mencedakakan diri sendiri dengan sengaja;
- 20.6.4. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shinshe, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
- 20.6.5. penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup kecelakaan kerja dan akibat dari hubungan kerja;
- 20.6.6. semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
- 20.6.7. semua obat kosmetik, obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya;
- 20.6.8. operasi plastik dengan tujuan kosmetik;
- 20.6.9. penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan, diperberat oleh pekerjaan seperti hernia yang ada faktor bawaan, dan asma yang diakibatkan keturunan;
- 20.6.10. kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja;

20.6.11 .klaim pengobatan ...

20.6.11. klaim pengobatan dan perawatan yang sudah melewati 1 (satu) tahun dari tanggal pengobatan dan perawatan tersebut.

PIHAK KEDUA,



Dr. M. Syukri, MPH

PIHAK PERTAMA,



Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

Lampiran II.....

LAMPIRAN II

Perjanjian : PER/ ...../ 112019  
Nomor : 019 S/ 2018/ A.B./ 2019

Tentang  
Tarif Pelayanan Kesehatan

Tarif Pelayanan PLKK BPJS Ketenagakerjaan sesuai tarif yang disepakati (untuk Rawat Inap Kelas I).



Dr. M. Syukri, MPH

PIHAK PERTAMA,



Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

Lampiran III....

### LAMPIRAN III

Perjanjian : PER/ ...../ 112019  
Nomor : .....010-5/2648/43/2019

#### Tentang Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang melaporkan dan melengkapi dokumen klaim peserta yang sudah selesai masa perawatan untuk dilakukan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum pengajuan klaim;
2. Setiap akhir bulan atau selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merekap data pasien yang berobat untuk ditagihkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut,
  - 2.1. Foto copy kartu peserta;
  - 2.2. Surat Jaminan;
  - 2.3. Surat keterangan dokter yang merawat, yaitu Formulir 3b KK 3 untuk kasus kecelakaan kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus penyakit akibat kerja;
  - 2.4. Perincian tagihan;
  - 2.5. Kuitansi asli bermaterai;
  - 2.6. Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan.
3. **BPJS Ketenagakerjaan** membayarkan tagihan **Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang** sesuai dengan tagihan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah rekapitulasi data pasien yang berobat diterima;
4. Pembayaran dilakukan melalui pemindah bukuan rekening **Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang** di **Bank Jateng Cabang Magelang** dengan nomor rekening : **1062000666** atas nama **RSUD Muntilan** dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab **BPJS Ketenagakerjaan**. Fotokopy pemindahbukuan dikirimkan melalui faks atau surat elektronik (*email*) kepada **Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang** pada hari yang sama;
5. Biaya yang timbul atas kasus kecelakaan kerja yang terjadi di lalu lintas, dapat diajukan terlebih dahulu ke PT. JASA RAHARJA (Persero) sesuai besaran ketentuan yang berlaku. Selisih biaya yang tidak ditanggung oleh PT. JASA RAHARJA dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

6 . Pajak yang .....

6. Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PIHAK KEDUA,

Dr. M. Syukri, MPH

PIHAK PERTAMA,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

Lampiran IV....

LAMPIRAN IV

Perjanjian : PER/ ...../112019  
 Nomor : 019.9/2648/48/2019

Tentang  
 Format Laporan Pelaksanaan Di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan

Indikator/Detail : .....

RSUD MUNTILAN

DA : .....

DD : .....

Kategori		Sub-kategori		Sub-sub-kategori		Spesifikasi		Uraian													

PIHAK KEDUA,



Dr. M. Syukri, MPH

PIHAK PERTAMA,



Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

Lampiran V .....

## LAMPIRAN V

Perjanjian : PER/ ...../112019  
Nomor : ..019.9/ 2648/48/ 2019...

### Tentang Administrasi Surat menyurat.

<p>BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang Alamat Kantor Jl. Jend A.Yani No. 403 Magelang Alamat web <a href="http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id">www.bpjsketenagakerjaan.go.id</a> Nomor Telp/faks (0293) 310 430/ 310431 Petugas yang dapat dihubungi (PIC)</p> <p>1. Widiarti Suprapti Jabatan : Manajer Kasus No HP : 085329314999 Alamat email <a href="mailto:jkk.magelang@gmail.com">jkk.magelang@gmail.com</a></p> <p>2. Anita Budi Hastuti Jabatan : Penata Madya Pelayanan No. Hp : 08994123330</p>	<p>Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Alamat : Jalan Kartini No. 13, Muntilan Nomor Telp : <u>(0293) 587004</u> Fax : Petugas yang dapat dihubungi (PIC)</p> <p>1. Micael Sariyano Dwi Nugroho Jabatan : No. Hp : 085728139824</p> <p>2. Daryani Jabatan : No. Hp : 085741828159</p>
---	--